

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Negara Indonesia dihadapkan dengan pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Peraturan ini membuat kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, bahkan mengubah beberapa pasal undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan negara. Salah satu perubahan yang terjadi adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi penyelenggaraan keuangan negara. Akibat adanya pandemi Covid-19 APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia menjadi tidak stabil dan tidak dapat berjalan sebagaimana anggaran yang telah dirancang sebelumnya.

Salah satu daerah yang terdampak pandemi Covid-19 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan PAD. Penurunan tersebut digambarkan pada gambar grafik berikut.

Gambar I. 1 Grafik Penurunan PAD Kota Pangkalpinang

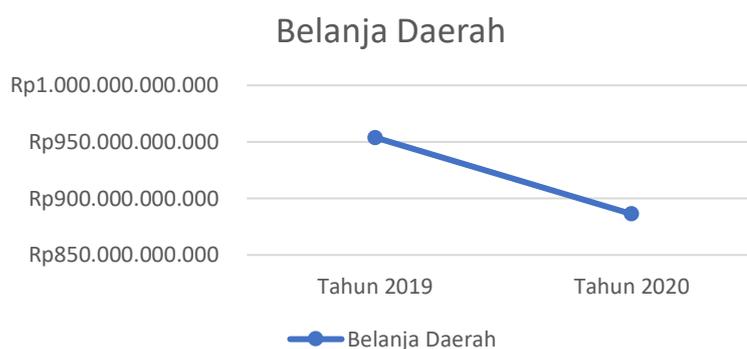


Sumber : Laporan Keuangan Kota Pangkalpinang 2019-2020

Penurunan PAD ini berdampak terhadap penurunan pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian Luluk Atika Rahmawati (2015, p.16) menjelaskan bahwa adanya hubungan signifikan dan positif antara PAD dan

belanja daerah. Penelitian tersebut juga menjelaskan apabila terjadi penurunan PAD maka akan berdampak terhadap terhambatnya pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Hubungan tersebut dirasakan oleh daerah Kota Pangkalpinang. Terjadi penurunan belanja daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

Gambar I. 2 Grafik Penurunan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang



Sumber : Laporan Keuangan Kota Pangkalpinang 2019-2020

Penurunan PAD yang diikuti dengan penurunan belanja daerah ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Pangkalpinang. Dibutuhkan langkah optimalisasi peningkatan PAD oleh pemerintah Kota Pangkalpinang melalui berbagai kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, Karya Tulis Tugas Akhir ini akan membahas terkait optimalisasi PAD dengan judul “ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap PAD Kota Pangkalpinang berdasarkan analisis laporan keuangan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2020?
2. Bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan PAD?
3. Apakah pelaksanaan optimalisasi PAD Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan KTTA adalah untuk mendeskripsikan :

1. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap PAD Kota Pangkalpinang berdasarkan analisis laporan keuangan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2020.
2. Upaya optimalisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan PAD.
3. Kesesuaian pelaksanaan optimalisasi PAD Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup analisis pendapatan asli daerah untuk daerah Kota Pangkalpinang yang terbatas pada tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam kehidupan akademis dan non-akademis, diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terkait pendapatan asli daerah dan langkah-langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Pangkalpinang.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan dan meningkatkan pemahaman terkait pendapatan asli daerah Kota Pangkalpinang.

b) Bagi Peneliti selanjutnya

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti lain kedepannya dalam pengembangan teori terkait optimalisasi pendapatan asli daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan terkait definisi pendapatan asli daerah, gambaran umum, dasar hukum serta teori-teori yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini secara umum terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum terkait objek penulisan, serta pembahasan hasil terkait masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab ini akan ditarik simpulan dengan secara ringkas mencantumkan hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan ini nantinya akan menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya terkait pendapatan asli daerah Kota Pangkalpinang.